

Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas

Dina Rohmatika

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 22204092010@student.uin-suka.ac.id

Abstrak: Kurikulum merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan. Pada tahun 2020, Mendikbudristek mengeluarkan kebijakan baru tentang kurikulum merdeka. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, maka perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kurikulum merdeka dan implikasinya dalam pembelajaran di SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan merdeka belajar menekankan pada enam dimensi profil Pelajar Pancasila yang juga terintegrasi dalam pembelajaran di mana dituangkan dalam kegiatan proyek Pelajar Pancasila. Pada merdeka belajar ini lebih menekankan pada kemandirian siswa, siswa dituntut untuk kreatif, dan bernalar kritis. Selain berimplikasi baik bagi siswa juga berimplikasi baik bagi guru di mana guru diberikan kebebasan dalam menyusun rancangan pembelajaran yaitu dengan menggunakan modul ajar sehingga pembelajaran tidak kaku dan monoton.

Kata Kunci: Kebijakan, Merdeka Belajar, Pembelajaran.

Abstract: The curriculum is the most important and inseparable part of the education system. In 2020, the Minister of Education and Culture issued a new policy regarding an independent curriculum. With this new policy it needs to be studied more deeply. This study aims to analyze the independent curriculum policy and its implications for learning in SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu. The research method in this article is descriptive-qualitative research. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the independent learning policy emphasizes the six dimensions of the Pancasila student project activities. In independent learning, this emphasizes more on student independence, students are required to be creative, and reason critically. In addition to having good implications for students, it also has good implications for teachers where teachers are given freedom in preparing learning designs, namely by using teaching modules so that learning is not rigid and monotonous.

Keywords: Policy, Freedom of Learning, Learning.

Pendahuluan

Dengan adanya kemajuan zaman, tentu saja akan ada efek positif dan negatif pada berbagai elemen, termasuk di dalam lembaga pendidikan. Saat ini kita berada dalam era industri 4.0, di mana konsep pendidikan telah berubah untuk menekankan kreativitas peserta didik agar bisa bersaing di era modern. Namun, pada kenyataannya, pendidikan saat ini cenderung menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan, sementara pendidik memiliki otoritas yang paling tinggi. Fokus pendidikan hanya terbatas pada aspek kognitif belaka. Akibatnya, hal ini membuat persiapan peserta didik oleh pendidikan untuk berinteraksi dengan masyarakat

kat dan dunia kerja menjadi tidak relevan bagi Pendidikan Menengah Atas.¹ Di dalam sistem pendidikan Indonesia, kurikulum telah mengalami sebelas kali pergantian sejak tahun 1947, dimulai dari kurikulum yang sederhana hingga yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Pergantian kurikulum ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum sebelumnya. Setiap perubahan tersebut merupakan kebijakan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan di Indonesia.²

Dalam proses pendidikan, kurikulum merupakan elemen yang sangat penting dan harus ada serta dilaksanakan. Kurikulum merupakan suatu perangkat yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Melalui kurikulum, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat, sehingga dapat menghasilkan generasi yang unggul dan memberikan manfaat dalam masyarakat.³

Dalam pengembangan kurikulum, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memastikan bahwa Kompetensi Pendidikan Lulusan (CPL) memiliki hasil yang memadai. Pertama, dilakukan studi oleh guru untuk menemukan konsep yang sesuai dengan perkembangan yang dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran (CP). Kedua, dilakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan pendidikan, kehidupan berbangsa dan bernegara, dunia kerja, industri, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, ditetapkan prioritas berdasarkan analisis kebutuhan. Keempat, dilakukan eksplorasi dan pemetaan materi yang relevan. Kelima, dilakukan pilihan antara 1) memunculkan mata pelajaran baru, 2) mengintegrasikan kompetensi baru yang dirumuskan ke dalam CP mata pelajaran yang sudah ada, atau 3) menghilangkan sebagian mata pelajaran yang ada.⁴

Capaian Pembelajaran, seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 yang mengubah Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022, memiliki tujuan agar peserta didik mengetahui dan mampu melaksanakan serta memahami pada akhir program atau urutan pembelajaran. Capaian pembelajaran ini disusun dalam format dan bentuk paragraf, sehingga hubungan antara pengetahuan dan kompetensi umum terlihat jelas dan terbentuk sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran.⁵

Langkah pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan terus memperbarui dan memperbaiki kurikulum. Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan adalah implementasi kurikulum merdeka belajar. Konsep merdeka belajar ini mengacu pada

¹ Syamsul Arifin, Nurul Abidin, dan Fauzan Al Anshori, "Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 7, no. 1 (2021): 65–78.

² Yekti Ardianti dan Nur Amalia, "Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 6, no. 3 (2022): 399–407.

³ Tuti Marlina, "Prosiding SNPE FKIP Universitas Muhammadiyah Metro 67" 1, no. 1 (2022): 67–72.

⁴ M Suryaman, "Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar" (2020): 13–28.

⁵ Dimas Ahmad Rizal, Moh Zodikin Zani, dan Zulkifli Syaumi Thontowi, "Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Perspektif Pendidikan Humanis Religius," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2023): 23–38, <https://journal.rumahindonesia.org/index.php/njpi/index%7C23>.

perancangan pembelajaran yang memberikan suasana belajar yang santai, bebas dari tekanan, dan memperhatikan bakat alami yang dimiliki oleh siswa. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa merdeka belajar ini bertujuan untuk memungkinkan siswa mengembangkan minat dan bakat masing-masing.⁶ Dalam konsep merdeka belajar, terdapat kebebasan yang diberikan kepada pendidik dan peserta didik. Pendidik diberikan kebebasan untuk memilih metode pembelajaran dan elemen-elemen terbaik dalam kurikulum. Sementara itu, peserta didik diberikan kebebasan untuk berpikir, berkreasi, berinovasi, dan berpikir secara kritis.

Kebijakan merdeka belajar telah memunculkan berbagai respons, seperti yang diungkapkan oleh Hadi yang dikutip oleh Mochamad Nursalim dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan positif dan negatif terhadap kebijakan tersebut. Beberapa pihak mendukung kebijakan merdeka belajar dan berpendapat bahwa ini merupakan solusi untuk masalah yang kompleks di lingkungan sekolah. Mereka menganggap bahwa Merdeka Belajar dapat mengatasi kesulitan yang ada. Di sisi lain, pihak yang menentang kebijakan tersebut mengatakan bahwa salah satu kebijakan merdeka belajar yang berkaitan dengan PPDB Zonasi dapat mengakibatkan siswa tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan dan ada siswa yang tidak terakomodasi dan tidak diterima di mana pun. Terlepas dari pendapat pro dan kontra, kebijakan merdeka belajar juga berdampak pada berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran dan pendidikan.⁷

Sebagai inisiatif kebijakan baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merdeka belajar membawa nuansa baru dan semangat baru bagi dunia pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Muhsin yang dikutip dalam penelitian Dwi Nur Fauziah Ahmad, tujuan dari program merdeka belajar adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuahkan kebahagiaan, sehingga belajar dianggap sebagai hobi oleh peserta didik dan menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Merdeka belajar ini lahir sebagai respons terhadap kekhawatiran yang ada dalam sistem pendidikan, di mana peserta didik sering kali terikat pada penilaian yang baku.⁸

Dasar hukum kebijakan merdeka belajar terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “Mencerdaskan kehidupan bangsa,” serta Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. UU Sisdiknas tahun 2003 juga menyatakan pentingnya sistem pendidikan nasional dalam mencapai pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, pembauran pendidikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut.⁹

⁶ Evi Susilowati, “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam,” *Al-Miskawiah: Journal of Science Education* 1, no. 1 (2022): 115–132.

⁷ Mochamad Nursalim, “Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar bagi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling,” *Journal System* 1, no. 1 (2022): 20, <https://ojs.abkinjatim.org/index.php/ojsdpabkin/article/view/141>.

⁸ Dwi Nur Fauziah Ahmad et al., “Merdeka Belajar dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 66.

⁹ Wikan Budi Utami, Agus Wedi, dan Fikri Aulia, “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila” 6, no. 20 (2022): 285–294.

Konsep Merdeka Belajar dipilih berdasarkan inspirasi dari filsafat Ki Hajar Dewantara yang mendasarkan pendidikan pada nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan. Konsep Merdeka Belajar dianggap relevan dan sesuai untuk diterapkan dalam era pendidikan saat ini.¹⁰ Namun sebagai kebijakan baru yang lahir didalam dunia pendidikan, tentu konsep merdeka belajar ini perlu dikaji kembali. Oleh karena itu peneliti hadir disini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan merdeka belajar dan implikasinya dalam pembelajaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian. Pendekatan kualitatif adalah strategi penelitian yang memberikan penekanan pada pemahaman makna, konsep, karakteristik, dan deskripsi suatu fenomena. Penelitian ini bersifat alamiah dan menggunakan cara-cara yang disajikan dalam bentuk naratif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman dan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah yang sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan model Miles dan Huberman yang melibatkan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan.¹¹ Sumber utama dalam penelitian ini adalah guru SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu. Adapun sumber sekunder didapat dari artikel jurnal, buku, dan sumber internet lainnya.

Kebijakan Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah moto dari kebijakan yang dipromosikan oleh Nadiem Makarim yang berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan sebebas-bebasnya dan seaman-nyamannya, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa tekanan. Konsep merdeka belajar ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, karena dalam kurikulum merdeka belajar ini, kemampuan dan keunikan kognitif siswa diperhatikan. Dalam kurikulum ini, tidak hanya peserta didik yang diberikan kebebasan dalam belajar, tetapi juga guru diberikan kebebasan untuk berinovasi, berkreasi, dan belajar secara mandiri. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat menjadi solusi karena didesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta didik.¹²

Merdeka belajar yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran memiliki makna dan implikasi yang baik bagi guru maupun siswa. Makna merdeka belajar yang dikemukakan dalam proses pembelajaran ini memiliki esensi yaitu memberikan kebebasan dalam berpikir, kebebasan berinovasi, dan kebebasan ber-kreatif.¹³ Senada dengan apa yang disampaikan oleh siregar yang dikutip oleh cucu suryana & sofyar iskandar dalam penelitiannya

¹⁰ Ahmad Rizal, dkk, "Kurikulum Merdeka Belajar."

¹¹ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ed. Anwar Mujahidin, 2019.

¹² Shofia Hattarina et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan," *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)* 1 (2022): 181–192, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA>.

¹³ T Ridwan et al., "Implementasi Merdeka Belajar di Smpn 2 Klagenan Cirebon," vol. 3, no. 2 (2022): 63–70, <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher/article/view/1332%0Ahttp://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher/article/download/1332/1100>.

menjelaskan bahwa merdeka belajar diartikan sebagai kemerdekaan dalam berpikir yang memiliki esensi bahwa peserta didik nantinya akan memiliki kebebasan dalam berpikir baik individu maupun secara berkelompok. Selain itu merdeka belajar juga dimaksudkan untuk menggali potensi yang ada di dalam diri guru dan siswa sehingga dapat berinovasi, kreatif, dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, sehingga dapat menghasilkan inovasi dalam pembelajaran.¹⁴

Merdeka belajar pada intinya adalah memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada pendidik untuk merancang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran ini disesuaikan dengan keberagaman siswa, perkembangan bakat dan minat, serta kebutuhan mereka. Tujuan dari merdeka belajar adalah menciptakan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan siswa dengan perasaan bahagia. Konsep merdeka belajar diimplementasikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar, dengan tujuan mencetak siswa yang memiliki karakter Pancasila. Profil siswa Pancasila mencakup enam aspek, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berpikir kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan menghargai kebhinekaan global. Dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa profil siswa Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku sesuai dengan identitas bangsa Indonesia dan sebagai warga dunia. Semua aspek ini diimplementasikan dalam proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Program Merdeka Belajar ini bertujuan untuk membantu siswa menjadi generasi yang unggul dan berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar.¹⁵

Profil Pelajar Pancasila adalah gambaran siswa Indonesia yang memiliki keunggulan dalam belajar sepanjang hayat, memiliki karakter, kompetensi global, dan menjadi panduan bagi guru dalam mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Untuk mengembangkan karakter profil Pelajar Pancasila, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 009/H/KR/2022 untuk membantu pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka.¹⁶

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 56/M/2022, proyek penguatan profil Pelajar Pancasila (P5) adalah sebuah kegiatan kokurikuler yang didasarkan pada proyek. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil Pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.¹⁷ Menurut penelitian yang dikutip oleh Pat Kurniati dkk, konsep kurikulum merdeka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan mengembangkan soft skill dan karakter siswa sesuai dengan profil Pelajar Pancasila; 2) Menitikberatkan pada materi yang esensial, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran kompetensi dasar seperti

¹⁴ Nindy Dewi Iryanto, "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menerapkan Konsep Merdeka Belajar di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 3829–3840.

¹⁵ Angga Angga dan Sopyan Iskandar, "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 5295–5301.

¹⁶ Susilowati, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam."

¹⁷ Jihanna Amalia, "Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Materi PAI pada Kelas 10 SMK Negeri 1 Depok Yogyakarta," *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2023): 39–60.

literasi dan numerasi; 3) Memberikan fleksibilitas kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik.¹⁸

Terdapat tiga elemen utama dalam kurikulum merdeka ini, yaitu sebagai berikut: 1) Berbasis Kompetensi, di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dipandang sebagai kesatuan yang membangun kompetensi yang utuh; 2) Fleksibilitas Pembelajaran, dengan menyusun capaian pembelajaran dalam periode 2-3 tahun per fase sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka; 3) Karakter Pancasila, di mana kegiatan pembelajaran di dalam kelas difokuskan pada proyek Pelajar Pancasila yang bertujuan membentuk dan memperkuat karakter siswa berdasarkan enam dimensi profil Pelajar Pancasila.

Menurut penelitian oleh Soleh yang dikutip oleh Amit Saepul Malik dan Ella Dewi Latifah, konsep Merdeka Belajar mengemukakan bahwa pendidik dan peserta didik adalah subjek dalam sistem pembelajaran. Ini berarti sumber kebenaran tidak hanya terletak pada pendidik, tetapi pendidik dan peserta didik bekerja sama untuk menjadi penggerak dan mencari kebenaran. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengubah sistem pendidikan dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian, guru dan peserta didik memiliki pengalaman yang kaya dalam lingkungan pendidikan.¹⁹ Sebenarnya, konsep Merdeka Belajar telah diusung sejak lama oleh Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa Merdeka Belajar adalah kegiatan pendidikan yang juga mengajarkan kepada pembelajar untuk mencapai perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Konsep ini memungkinkan terciptanya pembelajar yang inovatif, kreatif, unggul, dan mampu mengembangkan potensi diri dalam bidang keilmuan yang sedang dijalankan.²⁰

Ada empat kebijakan utama dalam konsep Merdeka Belajar menurut Arifin dan Muslim, yaitu: 1) Perubahan mekanisme Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN); 2) Perubahan bentuk Ujian Nasional yang sebelumnya berfokus pada penguasaan materi menjadi lebih berorientasi pada pengembangan pemahaman dan mengurangi penekanan pada hafalan, serta proses penilaian pada ujian nasional juga mengalami perubahan karena dianggap memberikan beban yang terlalu berat; 3) Pendidik diberikan kebebasan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 4) Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kondisi setiap daerah untuk mencegah sentralisasi dan mengurangi kesenjangan sosial dalam pemilihan sekolah.²¹

Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 pasal 2 ayat 1, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan di semua mata pelajaran. Bentuk ujian tersebut dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1, yang meliputi portofolio, penugasan, tes tertulis, atau kegiatan lain yang ditentukan oleh Satuan

¹⁸ Pat Kurniati et al., "Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya Bagi Siswa Dan Guru Abad 21," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2022): 408–423.

¹⁹ Amit Saepul Malik dan Ella Dewi Latifah, "Merdeka Belajar: Kajian Filsafat Tujuan Pendidikan Dan Implikasinya," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. Mei (2022): 99–117.

²⁰ Yepi Herpanda dan Neviyarni S Neviyarni S, "Relevansi Pemikiran Humanisme Terhadap Konsep Merdeka Belajar Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran," *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (2022): 88–96.

²¹ Saepul Malik dan Dewi Latifah, "Merdeka Belajar: Kajian Filsafat Tujuan Pendidikan Dan Implikasinya."

Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa kelulusan peserta didik ditentukan oleh Satuan Pendidikan. Dengan demikian, guru dan sekolah memiliki kebebasan dalam menilai hasil belajar siswa.

Dalam kurikulum merdeka, Ujian Nasional (UN) digantikan dengan istilah Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan bahasa dan literasi, berpikir menggunakan matematika atau numerasi, serta memperkuat pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian dilakukan pada jenjang sekolah tertentu seperti kelas IV, VIII, dan XI, dengan maksud mendorong guru dan sekolah untuk melakukan pemetaan kondisi pembelajaran, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi yang diuji dalam Asesmen Kompetensi Minimum, sebagai aspek kognitif, dibagi menjadi dua bagian. Pertama, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis teks dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Kedua, numerasi, yaitu kemampuan dalam menganalisis dan menggunakan angka. Materi ujian tidak lagi berdasarkan pada mata pelajaran, tetapi didasarkan pada kompetensi dasar yang diperlukan oleh siswa untuk belajar, tidak peduli materi atau mata pelajarannya apa.

Menurut Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 tahun 2019 yang mengatur tentang penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), terdapat beberapa poin penting. Pertama, penyusunan RPP harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada siswa. Kedua, komponen inti yang harus ada dalam RPP meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (penilaian hasil belajar). Ketiga, sekolah dan guru diberikan kebebasan dalam mencapai keberhasilan belajar siswa. Dengan memberikan kebebasan dalam penyusunan RPP, diharapkan siswa dapat memiliki peran aktif yang lebih besar, lingkungan pembelajaran yang dinamis, dan model pembelajaran yang tidak kaku.

Dalam konteks kurikulum merdeka belajar, peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi. Namun, implementasinya bersifat fleksibel, yang berarti daerah diberikan kewenangan untuk menentukan dan menetapkan wilayah-zonanya.

Tabel 1
Perbedaan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru kebijakan lama dengan Kebijakan Merdeka Belajar berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 pasal 11

Penentuan Jalur	Kebijakan lama	Kebijakan Merdeka Belajar
Jalur Zonasi	80%	50%
Jalur Afirmasi	15%	15%
Jalur Prestasi	5%	0-30% (d disesuaikan dengan masing-masing daerah)
Jalur Perpindahan	-	5%

Empat kebijakan Merdeka Belajar diatas harus berhasil dilaksanakan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam menerapkan

empat program kebijakan pendidikan nasional ini dengan tujuan untuk menyediakan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.²²

Implikasi Merdeka Belajar dalam Pembelajaran di SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu

Kebijakan merdeka belajar yang baru diperkenalkan telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka belajar, penekanan diberikan pada pembelajaran intrakurikuler yang mencakup sekitar 70-80% dari total jam pelajaran, serta pembelajaran kokurikuler yang mencakup sekitar 20-30% dari total jam pelajaran melalui kegiatan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan pendekatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengajak peserta didik untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di sekitar mereka. Pendekatan pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek ini dirancang sebagai acuan untuk mencapai kompetensi peserta didik. Dalam kegiatan proyek penguatan profil pancasila, terdapat tujuh tema yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bhineka tunggal ika, membangun jiwa dan raganya, suara demokrasi, pemanfaatan teknologi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kewirausahaan.

Di SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu, telah dilaksanakan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila (P5). Proyek ini mencakup tiga tema, yaitu bangunlah jiwa dan raga, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan. Selain menghasilkan karya, proyek ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam enam dimensi profil Pelajar Pancasila. Dimensi-dimensi tersebut meliputi iman kepada Tuhan, cinta terhadap lingkungan (dengan memanfaatkan limbah sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan), menghargai sesama, menjaga kelestarian lingkungan alam, berwawasan pancasila, serta memiliki kemampuan mandiri, kreatif, gotong royong, dan penalaran kritis. Profil Pelajar Pancasila memiliki kompetensi yang difokuskan pada pencapaian standar kompetensi lulusan di setiap jenjang pendidikan, dengan penekanan pada penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kompetensi dalam profil Pelajar Pancasila disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal yang terkait dengan identitas, ideologi, aspirasi bangsa Indonesia, serta tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0.

Pada Proyek 1 “Bangunlah Jiwa dan Raga” di SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu, ada tiga dimensi profil Pelajar Pancasila: 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia. Pelajar indonesia yang Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya Kepada Tuhan yang Maha Esa, memahami ajaran agama, dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada lima kunci Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi,

²² Indah Qona'ah, “Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Formal,” *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023): 1421–1424.

akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi ini juga memberikan pelajaran tentang bagaimana bisa menghargai antar sesama; 2) Bergotong Royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela sehingga apa yang dikerjakan dapat berjalan lancar. Tiga elemen dalam gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Pada dimensi ini ada aktivitas kelompok oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang baik; 3) Mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri adalah kesadaran diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pada aspek mandiri ini, siswa diberikan lembar kerja mandiri.

Pada proyek 2 “Kewirausahaan” di SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu, ada tiga dimensi profil Pelajar Pancasila: 1) Bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela sehingga apa yang dikerjakan dapat berjalan lancar. Tiga elemen dalam gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Dalam proyek profil Pelajar Pancasila menuntut siswa untuk saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan karyanya, dan hal ini dibutuhkan kerjasama yang baik antar tim maupun individu; 2) Mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri adalah kesadaran diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Pada proyek profil Pelajar Pancasila siswa dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan tugas yang diberikan; 3) Kreatif, pada proyek profil Pelajar Pancasila siswa dituntut untuk memiliki kreatifitas dan inovatif, hal ini bisa mengasah kemampuan *softskill* mereka. Dalam kegiatannya, siswa dilatih untuk saling membantu sama lain karena dibutuhkan kerjasama yang baik dalam kelompok maupun individu.

Pada proyek 3 “Gaya hidup berkelanjutan” di SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu, ada tiga dimensi profil Pelajar Pancasila: 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulias, tercermin pada kegiatan menjaga alam dan lingkungan sekitar; 2) Bergotong royong, pada elemen kerjasama antar tim dalam menyelesaikan sebuah karya. Elemen terpenting dalam bergotong royong adalah bagaimana bisa menciptakan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi; 3) Kreatif, pada dimensi ini tercermin dalam sebuah karya orisinal yang dihasilkan dari kreatifitas siswa. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah yang bisa menghasilkan sebuah karya orisinal dan memiliki keluwesan berfikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.

Merdeka belajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran memiliki implikasi yang positif bagi peserta didik, di antaranya memberikan kebebasan kepada siswa dalam berpikir, berinovasi, mandiri, dan kreatif. Hal ini terintegrasi dengan enam profil Pelajar Pancasila. Pertama, profil Pelajar Pancasila menekankan pentingnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Ini dapat diwujudkan dengan memulai kegiatan pembelajaran dengan doa, melibatkan siswa dalam kegiatan solat duha dan duhur berjamaah. Kedua, profil Pelajar Pancasila mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, dalam profil Pelajar Pancasila, gotong royong tercermin dalam kegiatan diskusi kelompok yang mendorong siswa bekerja sama dalam memecahkan masalah baik di dalam kelas maupun dalam proyek kelompok profil Pelajar Pancasila. Keempat, profil Pelajar Pancasila mendorong siswa untuk mandiri melalui pemberian tugas individu atau memberikan

pertanyaan kepada setiap siswa untuk dipecahkan secara mandiri. Kelima, profil Pelajar Pancasila mendorong siswa untuk berkreasi dan bersifat global dalam berkebhinekaan.

Terdapat pendapat yang beragam terkait kebijakan merdeka belajar, namun tidak dapat disangkal bahwa kebijakan ini memiliki implikasi positif dalam pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Anwar yang dikutip oleh Mochamad Nursalim dalam penelitiannya, beberapa implikasi kebijakan merdeka belajar termasuk mengurangi beban guru melalui penyederhanaan RPP, memberikan kebebasan kepada guru untuk berekspresi dan berkreasi dalam menyusun pembelajaran yang menarik, sehingga menciptakan kebebasan bagi guru dan siswa. Hal ini tentu dibutuhkan sebuah kompetensi mencakup sikap, tindakan, maupun keterampilan yang dapat menentukan keefektivitasan dalam pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka belajar ini, digunakan modul ajar yang mencakup langkah-langkah pembelajaran, materi pembelajaran, dan LK (Lembar Kerja). Meskipun mirip dengan kurikulum sebelumnya, namun modul ajar ini memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Adapun menurut pernyataan Dhani yang dikutip oleh Agustinus Tanggu Daga, peran guru dalam pengembangan kurikulum merdeka belajar meliputi beberapa hal, yaitu: Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik sesuai dengan tujuan kurikulum, karakteristik mata pelajaran, siswa, dan kondisi kelas. Kedua, Mendesain proses pembelajaran yang efektif untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan. Ketiga, melaksanakan proses pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum. Keempat, melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kelima, melakukan evaluasi terhadap interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang telah diimplementasikan.

Tabel 2

Berikut penulis klasifikasikan secara sederhana implikasi merdeka belajar dalam pembelajaran di SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu

Kebijakan	Implikasi
Merdeka Belajar	Pembelajaran menggunakan modul ajar
	Siswa menjadi aktif, kreatif, bernalar kritis sehingga mampu memecahkan permasalahannya
	Suasana Belajar yang menyenangkan, tidak kaku dan monoton
	Guru menjadi fleksibel dalam pembelajaran
	Mengembangkan <i>soft skill</i> dan karakter siswa sesuai profil Pelajar Pancasila

Essensi dari merdeka belajar adalah memberikan kebebasan berpikir kepada siswa dan guru, yang mendorong perkembangan karakter jiwa yang merdeka. Dalam lingkup ini, guru dan siswa diberi kebebasan dan kesenangan untuk mengeksplorasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada dalam lingkungan belajar dengan cara yang bebas dan menyenangkan.

Kesimpulan

Kebijakan mengenai merdeka belajar di antaranya adalah: 1) Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dikembangkan oleh tiap masing-masing sekolah; 2)

Pelaksanaan Ujian Nasional yang berubah menjadi assesment; 3) Kebebasan guru dalam mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 4) Fleksibelitas dalam penerimaan siswa baru (PPDB).

Lahirnya kebijakan merdeka belajar berimplikasi yang baik dalam pembelajaran. Baik guru maupun siswa diberikan kebebasan dalam berfikir, berinovasi, mandiri dan kreatif. Pada kurikulum merdeka belajar ini, guru diberikan kebebasan dalam merancang pelaksanaan pembelajaran sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan rasa kenyamanan dan kebahagiaan, guru sebagai fasilitator siswa artinya kebenaran mutlak dalam memberikan pengetahuan bukan bertumpu pada guru saja melainkan siswa memiliki peran aktif dan andil dalam memberikan pengetahuan sehingga kelas terasa hidup. Esensi merdeka belajar inilah yang memberikan siswa dalam kebebasan berfikir, berinovasi, mandiri dan kreatif. Hal ini kemudian terimplementasi dalam kegiatan proyek profil Pelajar Pancasila, dimana selain dapat menghasilkan sebuah karya, pada proyek profil Pelajar Pancasila ini juga untuk mengembangkan softskill dan karakter siswa, sebab dalam proyek profil Pelajar Pancasila ini terintegrasi dengan enam dimensi profil Pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berkebhinekaan global.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Dwi Nur Fauziah, Ahmad Arif Fadilah, Dwi Citra Ningtyas, dan Sarah Nurmila Putri. "Merdeka Belajar dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 66.
- Ahmad Rizal, Dimas, Moh Zodikin Zani, dan Zulkifli Syaqui Thontowi. "Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Perspektif Pendidikan Humanis Religius." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2023): 23–38.
- Amalia, Jihanna. "Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Materi PAI pada Kelas 10 SMK Negeri 1 Depok Yogyakarta." *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2023): 39–60.
- Angga, Angga, dan Sopyan Iskandar. "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 5295–5301.
- Ardianti, Yekti, dan Nur Amalia. "Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 6, no. 3 (2022): 399–407.
- Arifin, Syamsul, Nurul Abidin, dan Fauzan Al Anshori. "Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Ilmiah* 7, no. 1 (2021): 65–78.
- Herpanda, Yepi, dan Neviyarni S Neviyarni S. "Relevansi Pemikiran Humanisme terhadap Konsep Merdeka Belajar dan Implikasinya dalam Pembelajaran." *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (2022): 88–96.
- Iryanto, Nindy Dewi. "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menerapkan Konsep Merdeka Belajar di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 3829–3840.
- Kurniati, Pat, Andjela Lenora Kelmaskouw, Ahmad Deing, Bonin Bonin, dan Bambang Agus Haryanto. "Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya bagi Siswa

- dan Guru Abad 21.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (2022): 408–423.
- Nursalim, Mochamad. “Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar bagi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling.” *Journal System* 1, no. 1 (2022): 19–25.
- Qona’ah, Indah. “Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Formal.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023): 1421–1424.
- Ridwan, T, S Sutandi, M F Rirdaus. “Implementasi Merdeka Belajar di SMPN 2 Klangean Cirebon.” *Jurnal Ilmiah* 3, no. 2 (2022): 63–70.
- Saepul Malik, Amit, dan Ella Dewi Latifah. “Merdeka Belajar: Kajian Filsafat Tujuan Pendidikan dan Implikasinya.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. Mei (2022): 99–117.
- Shofia Hattarina, Nurul Saila, Adenta Faradila, Dita Refani Putri, dan RR.Ghina Ayu Putri. “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan.” *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)* 1 (2022): 181–192.
- Susilowati, Evi. “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Al-Miskawaih: Journal of Science Education* 1, no. 1 (2022): 115–132.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Diedit oleh Anwar Mujahidin, 2019.
- Utami, Wikan Budi, Agus Wedi, dan Fikri Aulia. “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila.” *Jurnal Ilmiah* 6, no. 20 (2022): 285–294.